

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202418819, 27 Februari 2024

Pencipta

Nama : **Lestari Agusalim, Budhi Purwandaya dkk**
Alamat : Jl. Babakan Lio RTRW 001/010 Kel. Balumbang Jaya, Kec. Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, 16116., Bogor Barat - Kota, Bogor, Jawa Barat, 16116
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lestari Agusalim, Budhi Purwandaya dkk**
Alamat : Jl. Babakan Lio RTRW 001/010 Kel. Balumbang Jaya, Kec. Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, 16116., Bogor Barat - Kota, Bogor, Jawa Barat, 16116
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**
Judul Ciptaan : **Inovasi Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Desa Nglangeran, Kabupaten Gunungkidul**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 27 Februari 2024, di Bogor - Bogor Barat
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000594180

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Lestari Agusalim	Jl. Babakan Lio RTRW 001/010 Kel. Balumbang Jaya, Kec. Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, 16116., Bogor Barat - Kota, Bogor
2	Budhi Purwandaya	Permata Candiloka X/18, RT 008/004 Kel. Balonggabus, Kec. Candi, Sidoarjo 61271, Candi, Sidoarjo
3	Mudrajad Kuncoro	Jl. Kaliurang KM 14, Gang Banteng, Nganggrung RT 01/30, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman , Sleman, Sleman

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Lestari Agusalim	Jl. Babakan Lio RTRW 001/010 Kel. Balumbang Jaya, Kec. Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, 16116., Bogor Barat - Kota, Bogor
2	Budhi Purwandaya	Permata Candiloka X/18, RT 008/004 Kel. Balonggabus, Kec. Candi, Sidoarjo 61271, Candi, Sidoarjo
3	Mudrajad Kuncoro	Jl. Kaliurang KM 14, Gang Banteng, Nganggrung RT 01/30, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman , Sleman, Sleman



Inovasi Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul

Lestari Agusalim^{a,1}, Budhi Purwandaya^{a,2}, Mudrajad Kuncoro^{b,2}

¹lestariagusalim@trilogi.ac.id, ²bpurwandaya@trilogi.ac.id, ³mudrajad@ugm.ac.id

^a Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Trilogi, Jl. TMP. Kalibata No.1, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760 Indonesia

^b Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Humaniora No.1, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Indonesia

Abstract

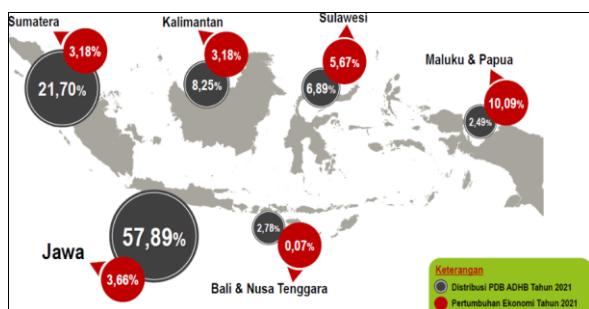
This research aims to thoroughly examine the efforts of the community and local government in addressing socio-economic issues in rural areas through innovative regional planning and development, particularly in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency. The research methodology employed a qualitative approach. Primary data was gathered through in-depth interviews and focus group discussions with stakeholders. Secondary data was utilized to complement the study's findings. The development of Nglanggeran Village focuses on the tourism sector, with community-based planning and development. Nglanggeran Village has received various international and national awards as the best tourist village. The development of Nglanggeran as a tourist village has created employment opportunities and improved the welfare of the local community.

Keyword: regional innovation, tourist village, community-based tourism

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di setiap perekonomian bertujuan untuk tidak saja meningkatkan kemakmuran warganya, namun lebih luas lagi kesejahteraannya. Hal ini dicapai dengan melakukan optimasi pemanfaatan berbagai sumber daya yang terbatas dalam melakukan pembangunan. Setidaknya dalam ekonomi tersebut, secara makro, harus terjadi pertumbuhan, stabilitas tingkat harga umum dan kesempatan kerja penuh. Kemudian pembangunan itu sendiri agar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, harus berjalan secara berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Soubbotina 2004; Salim 2020). Selain itu di negara berkembang, pembangunan tersebut juga harus mampu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan (Todaro dan Smith, 2015).

Di Indonesia, pembangunan ekonomi yang terjadi selama empat dasawarsa terakhir bias ke pulau Jawa dan Sumatra, atau disebut Kawasan Barat Indonesia (KBI). Kawasan ini menyumbang sebesar sekitar 78-80% dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) hanya berkontribusi sekitar 20-21%, dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Kuncoro, 2019). Hal ini terjadi hingga pada tahun 2021 (lihat Gambar 1) sebagai akibat dari belum berjalan desentralisasi pembangunan daerah sesuai dengan yang diharapkan (Agusalim, 2016).



Sumber: BPS Indonesia (2022)

Gambar 1. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pulau, 2021 (%)

Selanjutnya, ketimpangan pembangunan juga terjadi

di pulau Jawa sendiri. Penyumbang utama *output* nasional berasal dari provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dua provinsi lainnya, Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tertinggal, dimana DIY hanya mampu berkontribusi sebesar 0,9% terhadap PDB Indonesia selama tahun 2010-2020 (BPS, 2022).

Di provinsi DIY, terjadi juga ketimpangan sumbangan kepada *output* regional. di DIY. Kabupaten Sleman dan kota Yogyakarta merupakan dua daerah dominan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diikuti oleh kabupaten Bantul. Ketiga wilayah tadi sepanjang tahun 2016-2020 berkontribusi sekitar 80 persen nilai PDRB DIY. Dua kabupaten lainnya, Kulon Progo dan Gunungkidul merupakan penyumbang kecil *regional output* DIY (BPS DIY, 2021).

Sejak 1993, Kabupaten Gunungkidul tidak lagi menjadi kabupaten yang paling tertinggal di DIY. Kontribusi Gunungkidul sepanjang 2016-2020 rata-rata sekitar 15-18% tiap tahunnya pada PDRB DIY. Hal ini menjadikan kabupaten ini mengungguli Kabupaten Kulon Progo yang hanya menyumbang 7-8% tiap tahunnya pada periode yang sama. Kecilnya sumbangan pembentukan PDRB DIY oleh kedua kabupaten terakhir ini tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya alam dan manusia di daerah tersebut.

Bagian terbesar kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo berada di wilayah Pegunungan Seribu di pantai selatan pulau Jawa. Wilayah tersebut umumnya bertanah kapur dan relatif kurang subur untuk pertanian dibandingkan wilayahnya yang berada di sebelah utara. Sementara itu, pertanian masih menjadi tumpuan terbesar mata pencaharian warganya. Mengandalkan sektor pertanian saja tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten tersebut. Sebab itu diperlukan inisiatif lain, berupa inovasi pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Beruntung sekali wilayah pegunungan berkapur tadi memiliki potensi alam sebagai daerah tujuan wisata. Inovasi pembangunan dengan mengembangkan potensi wisata yang berkelanjutan merupakan pilihan yang rasional. Terlebih lagi pariwisata berbasis komunitas,

dengan segala kearifan lokalnya. Inovasi melalui pariwisata berbasis komunitas ini dilakukan karena badan internasional seperti The World Tourism Organization pada tahun 2002 sudah menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan pada suatu area tertentu mungkin dapat menjadi sarana yang mendasar dalam pembangunan ekonomi wilayah tersebut dan merupakan cara untuk mengatasi masalah kemiskinan pada daerah-daerah tertentu (WTO, 2002).

Lopez-Gusman et.al (2011) menyatakan bahwa *Community Based Tourism* (CBT) didasarkan kepada penciptaan produk-produk wisata yang bercirikan partisipasi masyarakat dalam pengembangannya. Dengan demikian, CBT merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak langsung. Keterlibatan tidak langsung ini terjadi dalam bentuk memberikan kesempatan akses dalam manajemen dan pembangunan pariwisata yang berujung pada pemberdayaan politis melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat lokal.

Community Based Tourism (CBT) dapat didefinisikan sebagai: (1) Bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata; (2) Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapatkan keuntungan; dan (3) Menuntut pemberdayaan secara politis, demokratis, dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung (Arifin, 2017).

Beberapa studi yang terkait dengan dan dirujuk dalam kajian ini diawali oleh penelitian yang dilakukan oleh Lopez-Gusman *et al.*, (2011). Para peneliti ini mengamati CBT di El Salvador yang tergolong ke dalam negara berkembang. Dengan mengkaji persepsi penduduk lokal di perdesaan atas wisata alternatif (CBT) tersebut, mereka menemukan bahwa wisata jenis ini dipandang mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan penduduk lokal dan meningkatkan kesejahteraannya. Namun hal tersebut harus disertai dengan upaya pelatihan teknis dan pembukaan wawasan penduduk lokal oleh institusi publik dan privat.

Pentingnya memahami persepsi komunitas lokal akan manfaat dan mudaratnya CBT juga dilakukan oleh Sita dan Moh. Nor (2012). Menggunakan pendekatan teoritis mereka menganalisis konsep program Malaysia *Homestay programme*-nya Kementerian Pariwisata. Dari kajian tersebut, para peneliti tersebut kemudian menyarankan model yang dapat diimplementasikan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal yang menjadi daerah destinasi wisata alternatif ini.

Jika kedua penelitian di atas mengkaji persepsi komunitas lokal terhadap CBT, Yanes *et al.*, (2019) menggunakan perspektif lain dalam mengkaji CBT. Mereka mengevaluasi kebijakan publik yang bertujuan memanfaatkan CBT bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan memakai kasus di 7 desa di Columbia, hasil penelitiannya menemukan bahwa umumnya kebijakan publik yang berlaku di wilayah kajian, ternyata lemah dalam upayanya menunjang CBT.

Arifin (2017) juga mengkaji CBT di wilayah kota tua Jakarta. Ada sepuluh komunitas di wilayah yang disebut dengan istilah kota tua di Jakarta. Dengan mengamati beberapa komunitas yang eksis di wilayah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi hubungan masyarakat (*public relations*) berperan sangat penting dalam mengangkat potensi wisata di kota tua Jakarta.

Aspek lain dalam CBT adalah para wisatawan yang datang berkunjung di destinasi wisata tersebut. Aspek inilah yang menjadi fokus studi Han *et al.* (2019) di Korea Selatan. Berbeda dengan pendekatan penelitian kualitatif di atas, Han *et al.*, (2019) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mempelajari kaitan antar *latent variable* melalui Model Persamaan Struktural. Hasil temuan mereka menunjukkan bahwa kinerja CBT secara signifikan mempengaruhi pembentukan niat pasca-pembelian para wisatawan. Artinya, niat para wisatawan untuk kembali berkunjung ke destinasi wisata tersebut tergantung kepada kinerja layanan yang mereka rasakan yang diberikan oleh komunitas lokal ybs. Kinerja ini selain jasa layanan wisata juga termasuk infrastruktur dan promosinya. Menariknya hubungan antara kinerja CBT dengan niat pasca pembelian tadi dimoderatori oleh rasa ikut memiliki para wisatawan akan destinasi yang mereka kunjungi.

Kualitas dan kuantitas jasa layanan wisata tadi tidaklah dapat diharapkan timbul dengan kesadaran komunitas lokal sendiri. Mereka memiliki dan menyediakan sarana pengalaman wisata alternatif baru bagi para wisatawan, namun pengetahuan mereka akan layanan wisata itu sangatlah terbatas. Karenanya diperlukan pelatihan teknis dan pengembangan wawasan tentang bagaimana memberikan layanan yang memberi kesan positif kepada para wisatawan. Disinilah perlunya kerja sama para pemangku kepentingan atas CBT, yang terdiri dari pemerintah, usaha swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akademisi dari perguruan tinggi dan komunitas lokal itu sendiri (Lopez-Gusman *et al.*, 2011; Arifin, 2017; Han *et al.*, 2019; dan Yanes *et al.*, 2019). Aspek inilah yang menjadi fokus kajian Wijanarko *et al.*, (2020) dalam penelitian mereka di desa Kelor, Turi di Kabupaten Sleman. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis antar para pemangku kepentingan, maka tujuan CBT untuk membuka lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, sukar akan dicapai. Masyarakat di desa Kelor merasakan manfaat CBT tersebut dalam bentuk terbukanya kesempatan kerja baru dan tambahan pendapatan. Hal inilah yang mungkin yang dimaksud oleh World Tourism Organization (2002) dalam konsep pengembangan CBT sebagai sarana mengatasi kemiskinan di perdesaan.

Hong *et al.*, (2021) juga melakukan penelitian tentang CBT ini di desa Hoi An di provinsi Quang Nam di Vietnam. Desa ini dikenal sebagai desa penghasil kerajinan tradisional di tempat berinteraksinya budaya lokal dan internasional. Seperti hal di destinasi CBT di banyak tempat kerjasama banyak pihak pemangku kepentingan sangatlah penting. Selain itu kerjasama yang terjadi juga melampaui batas negara. Artinya kerja sama dengan lembaga internasional juga menjadi sarana penting bagi pengembangan CBT yang berkelanjutan.

Kajian-kajian tentang pariwisata berbasis

komunitas sudah banyak dilakukan. Pariwisata jenis ini merupakan bentuk wisata alternatif yang relatif baru dibandingkan wisata konvensional. Bentuk uniknya banyak ditemukan di negara berkembang. Penelitian-penelitian tentang topik tersebut, diantaranya telah dilakukan oleh Lopes-Gusman *et al.*, (2011); Sita dan Mohd. Nor (2012); Arifin (2017); Yanes *et al.* (2019); Hong *et al.* (2021); Somchan dan Choibamroong (2021); dan Wijanarko *et al.* (2020).

Penelitian ini memaparkan suatu bentuk inovasi pembangunan daerah melalui pengembangan pariwisata berbasis komunitas/masyarakat (*Community Based Tourism*) atau CBT. Pengembangan pariwisata yang didasarkan kepada kearifan lokal dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia tersebut terletak di kabupaten Gunungkidul, berupa kawasan gunung api purba di Nglanggeran di wilayah Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

II. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan mana dipakai untuk menjabarkan pengembangan konsep pariwisata berbasis komunitas di Nglanggeran, Patuk Kabupaten Gunungkidul. Deskriptif kualitatif ini di dasarkan kepada kajian kepustakaan dan wawancara dengan para nara-sumber yang memahami kepariwisataan berbasis komunitas.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer digali dengan mengadakan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang memahami pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu juga diperoleh dengan *focus group discussion* dengan narasumber baik dari pemerintah daerah maupun pengelola daerah wisata. Data sekunder diperoleh dari sumber data resmi, baik dari Badan Pusat Statistik DIY dan Kabupaten Gunungkidul maupun sumber-sumber resmi lainnya di pemerintah daerah. Selanjutnya, analisis konten digunakan untuk menjabarkan data primer dan sekunder yang di dapatkan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Kabupaten Gunungkidul seperti halnya kabupaten Kulon Progo berada di wilayah provinsi DIY, bersama dengan Kabupaten Bantul, kabupaten Sleman dan kota Yogyakarta. Masalah pokok di ekonomi Gunungkidul adalah: kualitas pertumbuhan ekonomi (*growth*) yang relatif rendah, masih tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan daerah, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keberdayaan masyarakat dan desa (Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2021).

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) selama 2016-2019 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun secara signifikan. Adanya Pandemi COVID-19 di tahun 2020 berdampak pada turunnya LPE se-DIY hingga menyentuh angka negatif sebesar 2,69. Meskipun LPE Gunungkidul juga terpengaruh negatif, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Gunungkidul boleh dibilang merupakan daerah dengan LPE tertinggi (-0,68%) se-DIY tahun 2020.

Sektor utama penyumbang PDRB Kab. Gunungkidul adalah sektor pertanian dalam arti luas (termasuk pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) (25%), diikuti oleh administrasi pemerintahan (9,3%), perdagangan (9,2%), industri pengolahan (9,2%), konstruksi (9%). Walaupun ekonomi secara keseluruhan mengalami kontraksi akibat pandemi tersebut, namun ada sektor-sektor ekonomi tertentu yang mengalami pertumbuhan. Pertumbuh positif terjadi pada sektor-sektor jasa: yaitu jasa kesehatan (24,5%), Informasi & komunikasi (18,6%), jasa pendidikan (6,6%).

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian, termasuk di Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut harus memperhatikan dan mencakup tiga aspek, yaitu: ekonomi, sosial dan lingkungan (Soubbotina 2004; Salim 2020). Dalam pembangunan itu sendiri harus pula mengandung inovasi yang akan mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Inovasi pembangunan tersebut diwujudkan dengan upaya, tanpa sepenuhnya mengabaikan pembangunan sektor pertanian, mengembangkan sektor ekonomi lain seperti jasa pariwisata. Pariwisata ditingkatkan pengembangannya karena kawasan Gunungkidul yang relatif kurang subur tersebut memiliki sumber daya alam dengan keunikannya sendiri-sendiri yang berpotensi dikembangkan menjadi lokasi atau destinasi wisata.

Potensi wisata di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata lain di luar ketiga jenis sebelumnya tersebut. Untuk wisata alam saja, setidaknya ada 52 destinasi wisata, yang terdiri dari pantai, sungai, goa dan embung. Ditambah lagi dengan wisata buatan manusia dan berbagai bentuk wisata budaya (Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2021).

Desa Nglanggeran dipilih sebagai desa program inovasi daerah dari 32 desa wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul dengan pertimbangan bahwa inovasi Desa Wisata Nglanggeran 100% diinisiasi dan dikelola oleh warga masyarakat yang terdiri 154 orang dan tersebar di 5 dusun di Desa Nglanggeran. Jumlah Pokdarwis Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan dari 21 Pokdarwis pada tahun 2017 menjadi 79 Pokdarwis pada tahun 2021 (Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2022).

Secara administratif, Desa Nglanggeran terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY. Desa Nglanggeran memiliki luas 762,1 ha dengan tata guna lahan sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, ladang, dan pekarangan. Pola pemilikan tanah tersebut didominasi oleh tanah kas desa.

Jarak Desa Nglanggeran dari ibukota kecamatan adalah 4 km, 20 km dari ibukota kabupaten dan berjarak 25 km dari ibukota provinsi. Batas administratif Desa Nglanggeran adalah: (1) Sebelah utara: Desa Ngoro-oro; (2) Sebelah timur: Desa Nlegi; (3) Sebelah selatan: Desa Putat; (4) Sebelah barat: Desa Salam. Desa Nglanggeran terdiri dari 5 dusun/pedukuhan yaitu Dusun Karang Sari, Dusun Doga, Dusun Nglanggeran Kulon, Dusun Nglanggeran Wetan dan Dusun Gunung Butak. Pusat pemerintahan desa terletak di dusun Doga.

Di desa ini dilakukan pengintegrasian pekerjaan utama masyarakat di sektor perkebunan dan peternakan

yang mendukung sektor Pariwisata. Dengan begitu, masyarakat tetap mendapatkan penghasilan dari pekerjaan utama dan mendapatkan nilai tambah dari sektor Pariwisata. Untuk meningkatkan daya saing di bidang pariwisata, masyarakat melalui Pokdarwis melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan BUMDesa Tunas Mandiri di Desa Nglanggeran, proses kerja sama dengan unsur *Pentahelix*.

Inovasi pengembangan Desa Wisata Nglanggeran berbasis CBT telah mengikuti konsep perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam RKDP tahun 2022 adalah "Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2022". Tema ini searah dan terintegrasi dengan level desa, provinsi dan nasional, yaitu untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketimpangan wilayah, peningkatan sosial ekonomi pasca Pandemi Covid-19, dan peningkatan infrastruktur daerah.

Selanjutnya, rencana pengembangan Desa Wisata Nglanggeran juga menggunakan pendekatan integratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk bersama mewujudkan peningkatan kesejahteraan khususnya masyarakat Nglanggeran dan secara umum masyarakat Gunungkidul. Pola kerja sama melibatkan masyarakat, pemerintah, BUMN, swasta, akademisi, LSM dan komunitas.

Perencanaan pembangunan juga harus memasukkan dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan agar manusia tidak hidup dalam dunia 'aspasial' (*spaceless*). Visi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030 diarahkan untuk mewujudkan Dhaksinargha Bhumikarta dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan. Tujuannya untuk mewujudkan wilayah kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Potensi Wisata

Terdapat enam potensi pariwisata di Desa Nglanggeran, yaitu: Pertama, adanya Gunung Nglanggeran dan kini lebih dikenal dengan sebutan Gunung Api Purba yang merupakan salah satu *Geosite* di gunung Sewu UNESCO Geopark. Secara fisiografi Gunung Api Purba Nglanggeran terletak di Zona Pegunungan Selatan Jawa Tengah-Jawa Timur atau tepatnya di Sub Zona Pegunungan Baturagung (Baturagung Range) dengan ketinggian 700 meter dari permukaan laut dan kemiringan lerengnya curam-terjal (>45%). Gunung Nglanggeran berdasarkan sejarah geologinya merupakan gunung api purba yang berumur tersier (Oligo- Miosen) atau 0,6-70 juta tahun yang lalu.

Kedua, di Kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran juga dijumpai fauna dan flora langka, seperti tanaman termas (tanaman obat yang hanya hidup di kawasan ekowisata Gunung Api Purba), kera ekor panjang serta di sekitar Gunung Api Purba berkembang kegiatan seni dan budaya lokal seperti bersih desa dll. Dengan adanya potensi tersebut di Desa Nglanggeran juga pengembangan desa wisata. Jadi ada 2 potensi pengembangan, yaitu: Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba dan Desa Wisata

Pesona Purba Nglanggeran. Untuk desa wisata dikembangkan menuju desa budaya dan desa pendidikan, yang di mana bisa melakukan aktivitas belajar tentang flora fauna, cocok tanam, seni budaya dan juga belajar hidup bermasyarakat dengan tata krama (unggah-ungguh).

Ketiga, Embung Nglanggeran sebagai inovasi konservasi air, yakni menampung air hujan digunakan untuk pengairan kebun buah seluas 20 Ha. Kebun buah durian dan kelengkeng. Saat ini lokasi Embung Nglanggeran menjadi lokasi tujuan wisata masyarakat. Selanjutnya, ada objek wisata Puncak Kampung Pitu yang merupakan salah satu daya tarik alam dan budaya. Di kampung ini hanya terdiri dari tujuh kepala keluarga.

Keempat, kawasan Glamping dan Air Terjun Kedung Kandang. Air Terjun Kedung Kandang merupakan air terjun yang ada di daerah wisata Gunung Api Purba Nglanggeran. Yang berbeda dari air terjun ini adalah lokasinya yang berada di persawahan bertingkat atau sengkedan. Air terjun ini bersusun atau bertingkat dengan susunan batuan vulkanik dan terjadi secara alamiah.

Kelima, terdapat *homestay* yang nyaman untuk ditempati oleh wisatawan. Desa Wisata Nglanggeran mengelola 80 homestay dengan daya tampung bisa mencapai 280 orang. Keenam, Griya Cokelat Nglanggeran. Griya Cokelat menjadi tempat favorit dalam wisata belanja di Gunung Api Purba dan ada pula Griya Batik dan Griya Spa sebagai penunjang datangnya wisatawan. Griya Cokelat memproduksi olahan coklat dan susu yang diperoleh langsung dari kebun dan peternakan di kawasan Gunung Api Purba. Beberapa olahan yang menjadi kegemaran pengunjung, yaitu keripik pisang coklat dan susu kambing coklat. Bahan baku coklat ini diperoleh dari hasil perkebunan warga Nglanggeran.



Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul (2022)
Gambar 2. Daya Tarik Wisata Desa Nglanggeran

Inovasi Wisata Berbasis CBT

Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran berbasis CBT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan segala potensi alam dan budaya yang ada sekaligus menjaga kelestariannya. Pengembangan ini juga bertujuan mawadahi masyarakat yang cinta terhadap desanya untuk bekerja sama melakukan kegiatan masing-masing dengan pariwisata menjadi simpul pengikatnya sehingga nilai-nilai kearifan desa tetap terjaga dan masyarakat sejahtera dengan adanya aktivitas kepariwisataan sebagai pengungkit kegiatan perekonomian. Harapannya, apabila tujuan tersebut terwujud dapat menjadikan Desa Nglanggeran sebagai kawasan ekowisata yang unggul berwawasan lingkungan dan berbasis Masyarakat.

Persoalan utama Kabupaten Gunungkidul khususnya Desa Nglanggeran adalah masih banyaknya masyarakat yang belum sejahtera, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan persoalan tersebut, maka dikembangkanlah inovasi daerah Desa Wisata Nglanggeran berbasis CBT dengan menerapkan Kerangka Kerja Logis (KKL) dengan tahapan *input*, *proses*, *output*, dan *outcome* (dampak).

Tabel 1. Kerangka Kerja Logis Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran

Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
Dampak	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi penurunan kemiskinan • Meningkatnya kualitas SDM • Terciptanya lapangan kerja baru • Penghargaan desa wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah orang miskin dan tingkat kemiskinan • Indeks pembangunan manusia • Tingkat pengangguran terbuka • Jumlah Penghargaan atas inovasi
Outcome Antara	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya sektor usaha yang mendukung sektor wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan jumlah usaha yang berkembang
Outcome Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pendapatan pemerintah daerah • Meningkatnya pendapatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • Pendapatan Desa
Output	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan CBT • Peningkatan kualitas SDM dibidang kepariwisataan • Meningkatnya wisatawan untuk berkunjung • Meningkatnya objek wisata baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sarana prasarana pendukung kegiatan CBT • Jumlah Sertifikasi SDM atau Usaha • Jumlah wisatawan • Jumlah objek wisata
Kegiatan/Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksanakan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan CBT • Terlaksanakan pelatihan peningkatan kualitas SDM • Terlaksanakan pembinaan dan pengembangan desa wisata • Terlaksanakan promosi pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sarana prasarana pendukung kegiatan CBT • Jumlah pelatihan pengembangan SDM • Jumlah pembinaan dan pengembangan desa wisata • Jumlah dan jenis promosi pariwisata
Input	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya regulasi pendukung inovasi • Tersedianya dana/anggaran • Tersedianya sumber daya manusia • Tersedianya inisiator dan penanggung jawab pelaksana inovasi • Tersedianya institusi <i>stakeholders</i> yang terlibat • Tersedianya potensi pengembangan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • RPJMD 2021-2026, RKPD 2022, RIPPARDA 2014-2025 • Anggaran yang terdapat dalam RKPD • Pokdarwis, Pemda GK, akademisi, BUMDesa, swasta, NGO/LSM, komunitas. • Pokdarwis dan Pemda GK • Pemda GK, Pemda DIY, Kemenparekraf • Jumlah potensi wisata
Permasalahan & penyebab permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih relatif banyak masyarakat yang belum sejahtera • Masih rendahnya kualitas SDM masyarakat • Masih rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah orang miskin • Tingkat kemiskinan • Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2021 (diolah)

Pada tahapan *input*, untuk melahirkan inovasi pengembangan desa wisata diperlukan regulasi pendukung inovasi terdiri dari RPJMD 2021-2026, RKPD 2022, RIPPARDA 2014-2025. Selain itu, Bupati Kabupaten Gunungkidul juga telah mengeluarkan SK No. 212/2020 tentang Penetapan Desa Wisata Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. Di dalam SK tersebut telah ditetapkan beberapa potensi wisata yang perlu dikembangkan, yaitu wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata ekonomi kreatif. Dari RKPD dialokasikan dana untuk melaksanakan program inovasi. Pelaksanaan inovasi membutuhkan campur tangan banyak pihak di antaranya: Pokdarwis, Pemda Gunungkidul, akademisi, LSM, BUMDes, swasta, dan komunitas. Inisiator dan penanggung jawab inovasi dipegang oleh Pokdarwis dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. *Input* utama yang dibutuhkan adalah potensi pengembangan wisata, yaitu jumlah objek wisata yang perlu dikembangkan. Pada tahapan proses, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran berbasis CBT,

sebagai berikut: Pertama, Pokdarwis bersama pemerintah daerah telah melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan program inovasi dalam mengembangkan Desa Wisata Nglanggeran berbasis CBT. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan pelatihan tata kelola *homestay* menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non-Fisik, *talkshow* pariwisata, *workshop* pengelolaan desa wisata menggunakan Dana Keistimewaan (DANAIS), pembinaan desa wisata, sosialisasi/kampanye sadar wisata, dan forum komunikasi desa wisata.

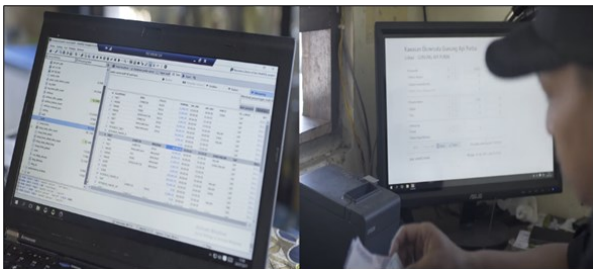
Kedua, dikembangkan program *live-in*, yaitu program wisata yang memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk tinggal dan bergaul dengan masyarakat perdesaan. Program ini dirancang agar wisatawan dapat mengikuti semua kegiatan tuan rumah atau orang tua baru mereka di Nglanggeran. Wisatawan tidak hanya menikmati suasana liburan tetapi juga menambah pengetahuan tentang kehidupan desa. Tujuan dari program ini adalah menumbuhkan sikap hidup sederhana, bekerja keras, gotong royong, bertanggung jawab, tolong bantu, peduli

terhadap lingkungan, bekerja sama, menghargai diri sendiri, saling menghargai, dan bersikap jujur dalam hidup.



Sumber: www.gunungapipurba.com
Gambar 3. Program Live In di Desa Nglangeran

Ketiga, dikembangkan sistem tiket elektronik (*e-ticketing*). Sistem *e-ticketing* digunakan dalam mengelola Desa Wisata Nglangeran. Hasilnya, pengelolaan wisata menjadi lebih transparan, jumlah wisatawan, dan pemasukan terdata dengan baik, hingga potensi kebocoran pendapatan asli desa pun dapat dicegah sehingga meminimalkan konflik pengelolaan. Hal ini juga menjadi salah satu upaya untuk digitalisasi destinasi dan *go-digital* yang dilakukan oleh Pokdarwis Nglangeran. Dengan sistem ini akan memberikan kemudahan pelayanan dan membantu proses administrasi yang lebih rapi dan akurat.



Sumber: youtube Gunung Api Purba Nglangeran
Gambar 4. Sistem E-Ticketing di Desa Nglangeran

Keempat, pada masa pandemi Covid-19 diterapkan program CHSE (*cleanliness, health, safety, environment*). Desa Nglangeran telah menerapkan protokol kesehatan yang berbasis pada *cleanliness* (kebersihan), *health* (kesehatan), *safety* (keamanan), dan *environment sustainability* (kelestarian lingkungan). Hal ini diterapkan karena Desa Nglangeran perlu beradaptasi dengan

pandemi dengan lakukan inovasi CHSE di era *new normal*, yang pada gilirannya dapat menggairahkan kembali sektor pariwisata.



Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul (2022)
Gambar 5. Penerapan CHSE Saat Pandemi Covid-19

Kelima, pengembangan *Gambling Virtual Tour* di Kawasan air terjun Kedung Kandang. *Glamorous camping* atau *glamping* merupakan inovasi baru di bidang akomodasi dan pariwisata yang sedang populer beberapa tahun belakangan. *Glamping* memberikan pengalaman menginap di tenda dengan fasilitas yang tidak kalah mewah hotel bintang tiga. Di saat pandemi, untuk menarik wisatawan, Pokdarwis membuat tur virtual yang memvisualisasikan simulasi lokasi yang terdiri dari rangkaian video, gambar, dan elemen multimedia lainnya seperti efek suara, narasi dan teks.



Sumber: www.gunungapipurba.com
Gambar 6. Kawasan Glamping Desa Nglangeran

Keenam, pada tahun 2020, telah dilaksanakan pembinaan dan pengumuman juara lomba desa wisata dan Pokdarwis, sosialisasi/kampanye sadar wisata, melakukan kegiatan padat karya (rehab gazebo, pengerasan jalur *tracking, corrabat*) menggunakan Belanja Tidak Terduga dari Dana Insentif Daerah (BTT DID), *land clearing* area parkir Kawasan Gunung Api Purba Nglangeran menggunakan DANAIS.

Ketujuh, pada tahun 2019 dilaksanakan forum komunikasi desa wisata, sosialisasi dan revitalisasi geopark, sosialisasi/kampanye sadar wisata, *Talkshow* pariwisata dengan TA TV, Gunungkidul Tourism Festival, dan *Geopark Night Specta*. Pada tahun 2018, melaksanakan DED area parkir Kawasan Gunung Api Purba, pengadaan tanah untuk daerah parkir, pengibaran bendera raksasa, Nglangeran *Mountain Bike*, Festival Reog Jathilan pada level Provinsi DIY. Pada tahun 2017, dilakukan jelajah Geopark Gunung Sewu.

Kedelapan, pada tahun 2022, pokdarwis dan pemerintah sedang melakukan pengembangan Kawasan Glamping Kedung Kandang dan pengembangan diversifikasi produk kakao "*Bean to Bar*", yaitu mengubah biji kakao menjadi coklat batangan.



Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul (2022)
Gambar 7. Produk kakao "Bean to Bar"

Dampak Inovasi Daerah

Dari proses inovasi dihasilkan *output* sebagai berikut: Pada tahun 2021 terjadi peningkatan objek di Kapanewon Patuk menjadi 8 objek wisata, yang pada tahun 2019 hanya ada satu objek wisata. Jumlah wisatawan pada tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Wisatawan mancanegara turun 82%, dan wisatawan domestik turun 46%. Penurunan ini juga disebabkan oleh kebijakan pembatasan berpergian oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada tahun 2019, pengembangan Desa Wisata Nglanggeran menghasilkan *outcome* berupa pendapatan desa wisata Nglanggeran sebesar Rp.3,3 miliar. Dari pendapatan tersebut didistribusikan untuk retribusi pmda, pajak pratama, pekerja, BUMDes, sarana dan prasarana, pengembangan, promosi, dusun, sosial, cadangan, asuransi, dan PAD Desa. Selain itu, kegiatan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran telah mampu menyerap 154 tenaga kerja.

Desa Nglanggeran telah memperoleh berbagai macam penghargaan di bidang kepariwisataan, di antaranya sebagai berikut: (1) Penghargaan sebagai Desa Wisata Terbaik Dunia (*Best Tourism Village*) 2021 dari Organisasi Pariwisata Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO). (2) Penghargaan Desa Wisata Mandiri Inspiratif 2021 oleh Kemenparekraf. (3) Penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan tahun 2021 dari Kemenparekraf RI. (4) Menjadi Pemenang ASTA (ASEAN Sustainable Tourism Award) tahun 2018. (5) Top 100 Destinasi Berkelanjutan Dunia 2018 atau *Sustainable Destinations Top 100* versi Global Green Destinations Days (GGDD). (6) Penghargaan sebagai Desa Wisata Terbaik di Indonesia dan menerima penghargaan ASEAN CBT Award di Singapura 2017.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI

- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan desentralisasi di Indonesia. *Kinerja*, 20(1), 53-68.
- Arifin, A. P. R. (2017). Pendekatan community based tourism dalam membina hubungan komunitas di kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Visi Komunikasi*, 16(01), 111-130.
- Bappeda Kabupaten Gunungkidul. (2021). Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026, Perda No. 4 tahun 2021, Wonosari: Bappeda Kabupaten Gunungkidul.
- Gunungapipurba.com. (2022). *Tempat wisata spesial*, <http://www.gunungapipurba.com>, diakses tanggal 18 Agustus 2023.
- Han, H., Eom, T., Al-Ansi, A., Ryu, H. B., dan Kim, W. (2019). Community-based tourism as a sustainable direction in destination



Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul (2022)
Gambar 8. Contoh Penghargaan Desa Nglanggeran

IV. KESIMPULAN

Program pengembangan Desa Wisata Nglanggeran berbasis CBT merupakan program kerja sama berbagai pihak antara, Pokdarwis, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi, Kementerian, swasta, BUMdes, akademisi, LSM, dan komunitas masyarakat. Gabungan kerja sama ini menciptakan kreativitas dan inovasi untuk menjawab persoalan yang ada. Inovasi yang dikembangkan oleh Desa Wisata Nglanggeran dapat direplikasi oleh desa wisata lainnya di Gunungkidul yang mempunyai potensi untuk dapat dilaksanakan. Replikasi dapat dilakukan melalui studi lapangan atau melalui lokakarya.

Desa Wisata Nglanggeran akan terus melakukan inovasi-inovasi baru untuk menjawab berbagai tantangan di masa yang akan datang. Adapun upaya terstruktur yang dilakukan untuk selalu membuat terobosan baru dengan cara peningkatan jumlah Pokdarwis dan penguatan organisasi dengan cara melakukan sesi *brainstorming* untuk merumuskan ide secara rutin (manajemen ide). Jumlah Pokdarwis Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan dari 21 Pokdarwis pada tahun 2017 menjadi 79 Pokdarwis pada tahun 2021. Ini adalah modal untuk mendorong peningkatan inovasi berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul.

development: An empirical examination of visitor behaviors, *Sustainability*, 11, 2864; doi:10.3390/su11102864.

- Hong L. P., Ngo H. T., dan Pham L. T. (2021) Community-based tourism: Opportunities and challenges a case study in Thanh Ha pottery village, Hoi An city, Vietnam. *Cogent Social Sciences*. doi.org/10.1080/23311886.2021.1926100.
- Kuncoro, M. (2019) *Ekonomika regional: Teori dan praktik*. Rajawali Pers: Depok.
- López-Guzmán, T., Sánchez-Cañizares, S., dan Pavón, V. (2011). Community-based tourism in developing countries: A case study. *Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism Volume 6*, Number 1, Spring 2011, pp. 69-84.
- Salim, E. (2020). Bangun bangsa adil makmur 2045, dalam Hadad et.al (Eds). 90 tahun Prof. Emil Salim; *Pembangunan berkelanjutan: Menuju Indonesia tinggal landas 2045*. Yayasan Kehati, Jakarta.

- Sita, S. E. A. D., dan Mohd. Nor N. A. (2012). Community-based tourism (CBT): Local community perceptions toward social & cultural impacts, *Proceedings of the Tourism and Hospitality International Conference (THIC 2012)*.
- Somchan, S dan Choibamroong. (2021). Community-based tourism management for urban agriculture, *Indian Journal of Economics and Business*, Vol. 20 No. 3. pp 199-210.
- Soubbotina. T. P. (2004). *Beyond economic growth: An introduction to sustainable development*, The World Bank, Washington, D.C.
- Todaro M. P dan Smith S. C. (2015). *Economic Development*. 12th Ed. Pearson. New Jersey, USA 07458.
- Wijanarko, H., Utomo, H. S., Wibawa, T., Suratna., dan Wahyurini, E. (2020). Community-based tourism village governance: A case study, *Proceeding on Economic and Business Series (EBS)*. DOI: <https://doi.org/10.31098/ebs.v1i1.54>.
- World Tourism Organization. (2002). *Tourism and poverty alleviation*. Madrid, World Tourism Organization.
- Yanes, A., Zielinski, S., Cano, M. D., dan Kim. S. (2019). Community-based tourism in developing countries: A framework for policy evaluation. *Sustainability*, 11, 2506; doi:10.3390/su11092506.